

Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

Nurul Mahmudah¹, Yusri Anis Faidah²

^{1,2} Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Harapan Bersama
Email: nurulmahmudah1989@gmail.com

Article History

Received: 20/05/2023

Revised: 03/06/2023

Accepted: 06/06/2023

Keywords: *Evaluation of Village Funds, Physical Development, Village Fund Budget.*

Abstract: *The capacity of village officials as policy implementers is a supporting factor for the successful implementation of programs financed by the Village Fund. The abilities and skills of the village apparatus as implementers of policies are the basis of governance implementation. The competence of human resources in implementing the Village Fund policy is felt to be inadequate. This condition has an impact on the lack of effectiveness of program implementation, then other problems such as village officials who do not understand budget planning and execution, the disbursement process is too long and the accountability report process is complicated so that it has an impact on the incompatibility of priorities and non-priority planning of work programs made by Programs development programs originating from the Village Fund that focus on physical development have been running and have physical evidence, for example the construction of Normalization of canals and widening of farm roads, but these developments are felt to have no impact on all village communities. On the other hand, the problem that arises is the lack of outreach the Village Fund policy so that it does not touch the community which is the direct executor of the various programs funded. Lack of socialization has an impact on the lack of community participation to provide suggestions about what programs are urgent, as well as the low knowledge of village communities about village programs*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Ini terkait dengan pemerataan pembangunan dan dampaknya yang langsung dirasakan oleh sebagian besar penduduk pedesaan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Desa memiliki peran sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia, dengan

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Sumber pendapatan desa menjadi penting dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas tersebut.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 memberikan peluang pemberdayaan masyarakat desa dengan menjadikan desa sebagai komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 juga mengatur tentang desa, termasuk kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskan Peraturan Daerah tentang Dana Desa guna mengatur dan mengelola keuangan desa.

Desa Banjaranyar, Kabupaten Brebes, telah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat terkait pembangunan masih kurang, peran pihak ketiga seperti konsultan dan kontraktor masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini mengakibatkan ketidaksinkronan antara harapan masyarakat dan hasil pembangunan yang dicapai. Ketidakpuasan masyarakat juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman perangkat desa dalam perencanaan, pelaksanaan anggaran, proses pencairan dana yang lambat, serta rumitnya laporan pertanggungjawaban.

Kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan program-program yang menggunakan Dana Desa. Kurangnya kompetensi dan keterampilan aparatur desa berdampak pada kurangnya efektivitas pelaksanaan program, masalah perencanaan dan anggaran, serta proses pelaporan yang rumit. Program pembangunan yang berfokus pada infrastruktur fisik telah berjalan, namun belum merata dampaknya bagi seluruh masyarakat desa. Sosialisasi kebijakan Dana Desa masih kurang, sehingga partisipasi masyarakat dalam menyusun program-program yang mendesak juga rendah.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pengembangan fisik desa adalah Desa Banjaranyar, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2021 hingga Januari 2022. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait di Desa Banjaranyar, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumen Pertanggungjawaban dan Laporan Realisasi Anggaran.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi langsung terhadap Perangkat Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada pihak terkait yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab guna memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk studi pendahuluan masalah yang akan diteliti, serta untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari narasumber.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan sebagai salah satu teknik pengumpulan data atau informasi dengan bertatap muka langsung dengan informan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Banjaranyar. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan keadaan, peristiwa, atau objek dengan menggunakan angka atau kata-kata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang memungkinkan pencatatan dan analisis data secara sistematis dengan menggunakan perhitungan rasio efektivitas, yaitu membandingkan Realisasi Anggaran dengan Target Anggaran. Penilaian efektivitas dinyatakan sangat efektif jika hasil perhitungan di atas 100%. Dinyatakan efektif jika hasil perhitungan mencapai 100%. Cukup efektif jika hasil perhitungan mencapai 90-99%, kurang efektif jika hanya mencapai 75-89%, dan tidak efektif jika hasil perhitungan di bawah 75%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa Banjaranyar, Kabupaten Brebes, merupakan salah satu desa dari 23 desa lainnya di Kecamatan Brebes, dengan luas daerah sekitar 54 hektar. Desa Banjaranyar, Kabupaten Brebes, berjarak sekitar 6 km dari Ibu Kota Kabupaten Brebes dan sekitar 4 km dari Kecamatan Brebes. Sebagian besar wilayah Desa Banjaranyar, Kabupaten Brebes, adalah lahan pertanian. Jumlah penduduk di Desa Banjaranyar, Kabupaten Brebes, adalah 8.131 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.623 KK.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Proses pengelolaan APBDes, mulai dari penyusunan hingga pertanggungjawaban, merupakan salah satu ukuran tata pemerintahan yang baik (Hotimah, 2020). Sebagai dokumen publik, APBDes seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Rakyat, sebagai pemilik anggaran, harus dilibatkan dalam menentukan asal-usul dan besarnya Pendapatan Desa serta melalui musyawarah menentukan penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, harapan akan penggunaan anggaran untuk kesejahteraan rakyat dapat terwujud, dan tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes meliputi Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), BPD, Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur Warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan), dan Bupati/Camat.

APBDes merupakan pertanggungjawaban dari pihak pengelola desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintahan terkait pengelolaan dana desa dan pelaksanaan rencana program yang dibiayai oleh dana desa. APBDes merupakan gambaran rencana kerja pemerintah desa dalam satu periode. Dalam menyusun APBDes, Desa Banjaranyar membentuk tim RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang melibatkan Pejabat Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat (Karang Taruna, Ulama, dan lain-lain) (Relandani, 2020).

Dana Desa yang dikelola di Desa Banjaranyar bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa.

1. Tahap Perencanaan Pembangunan

Tahap perencanaan pembangunan di Desa Banjaranyar di mulai dari pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dimana RPJMDesa memuat rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian dibuat kembali Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPDesa di mulai dengan diadakannya Musyawarah Dusun (MusDus) pada tiap-tiap dusun di Desa Banjaranyar kemudian hasil yang didapatkan dari Musyawarah Dusun (MusDus) tersebut di musyawarah kembali di Musyawarah Desa (MusDes), Setelah Seluruh usulan pembangunan desa telah rampung dikumpulkan maka dibuatlah daftar usulan RKPDesa yang akan dibahas kembali di Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Kecamatan.

Tabel 1.

Alokasi Anggaran Dana Desa Pembangunan Paving RT 1 RW 1

No	Uraian	Jumlah
1	PEMBANGUNAN PAVING RT 1 RW 1	Rp 20.197.000
	Belanja Material Toko Pembangunan Paving RT 1 RW 1	Rp 9.567.000
	Belanja Material Alam Pembangunan Paving RT 1 RW 1	Rp 1.655.000
	Pekerja	Rp 8.975.000
2	BOP Paving	Rp 950.000
	Honor TPK	Rp 650.000
	Pembuatan DE & Gambar	Rp 300.000
3	Rabat Beton RT 4,5 RW 1	Rp 41.812.000
	Belanja Material Toko Rabat Beton RT 4,5 RW 1	Rp 29.495.000
	Belanja Material Alam Rabat Beton RT 4,5 RW 1	Rp 6.062.000
	Pekerja	Rp 6.255.000
4	Rabat Beton RT 4 RW 2	Rp 41.030.000
	Belanja Material Toko Rabat Beton RT 4 RW 2	Rp 28.843.800
	Belanja Material Alam Rabat Beton RT 4 RW 2	Rp 6.313.700
	Pekerja	Rp 5.872.500
5	Rabat Beton RT 7,8 RW 4	Rp 67.800.000
	Belanja Material Toko Rabat Beton RT 7,8 RW 4	Rp 47.942.000
	Belanja Material Alam Rabat Beton RT 7,8 RW 4	Rp 10.078.000
	Pekerja	Rp 9.780.000

No	Uraian	Jumlah
6	Rabat Beton Blok Balongan	Rp 136.376.000
	Belanja Material Toko Rabat Beton blok Balongan	Rp 115.566.000
	Belanja Material Alam Rabat Beton blok Balongan	Rp 7.400.000
	Pekerja	Rp 13.410.000
7	Rabat Beton RT 2 RW 3	Rp 26.317.000
	Belanja Material Toko Rabat Beton RT 2 RW 3	Rp 12.521.500
	Belanja Material Alam Rabat Beton RT 2 RW 3	Rp 9.958.000
	Pekerja	Rp 3.837.500
8	BOP Rabat Beton	Rp 5.290.000
	Honor TPK	Rp 650.000
	Pembuatan DE & Gambar	Rp 3.000.000
	ATK	Rp 1.000.000
	Sosialisasi	Rp 640.000
9	Pembangunan Jembatan RT 5 RW 1	Rp 8.723.000
	Belanja Material Toko Pembangunan Jembatan 5/1	Rp 4.121.000
	Belanja Material Alam Pembangunan Jembatan 5/1	Rp 2.157.000
	Pekerja	Rp 2.445.000
10	Pembangunan Jembatan RT 1 RW 1	Rp 4.000.000
	Belanja Material Toko Pembangunan Jembatan RT 1/1	Rp 2.166.400
	Belanja Material Alam Pembangunan Jembatan RT 1/1	Rp 748.600
	Pekerja	Rp 1.085.000
11	Pembangunan Jembatan RT 2 RW 3	Rp 10.870.000
	Belanja Material Toko Pembangunan Jembatan RT 2/3	Rp 5.160.000
	Belanja Material Alam Pembangunan Jembatan RT 2/3	Rp 2.860.000
	Pekerja	Rp 2.850.000
12	Peninggian Saluran Drainase RT 2 RW 3	Rp 18.680.000
	Belanja Material Toko Peninggian Saluran Drainase RT 2/3	Rp 5.680.000
	Belanja Material Alam Peninggian Saluran Drainase RT 2/3	Rp 7.525.500
	Pekerja	Rp 5.475.000
13	Pembangunan Talud RT 2 RW 3	Rp 9.875.000
	Belanja Material Toko Pembangunan Talud RT 2 RW 3	Rp 3.050.000

No	Uraian	Jumlah
	Belanja Material Alam Pembangunan Talud RT 2 RW 3	Rp 3.210.000
	Pekerja	Rp 3.615.000
14	Peninggian Saluran RT 3 RW 3	Rp 65.340.000
	Belanja Material Toko Peninggian Saluran Drainase RT 3/3	Rp 17.785.000
	Belanja Material Alam Peninggian Saluran Drainase RT 3/3	Rp 22.600.000
	Pekerja	Rp 24.955.000
15	Peninggian Saluran RT 2,3,4 RW 2	Rp 64.470.000
	Belanja Material Toko Peninggian Saluran Drainase RT 2,3,4/2	Rp 23.750.018
	Belanja Material Alam Peninggian Saluran Drainase RT 2,3,4/2	Rp 20.742.500
	Pekerja	Rp 25.490.000
16	Peninggian Saluran RT 2 RW 4	Rp 22.330.000
	Belanja Material Toko Peninggian Saluran Drainase RT 2/4	Rp 6.170.000
	Belanja Material Alam Peninggian Saluran Drainase RT 2/4	Rp 7.525.000
	Pekerja	Rp 8.635.000
17	Pembangunan Talud RT 2 RW 1	Rp 9.220.000
	Belanja Material Toko Pembangunan Talud RT 2/1	Rp 2.920.000
	Belanja Material Alam Pembangunan Talud RT 2/1	Rp 3.210.000
	Pekerja	Rp 3.090.000
18	Pembangunan Talud JUT Timur Makam Bangon	Rp 102.595.000
	Belanja Material Toko Pembangunan Talud JUT	Rp 27.355.000
	Belanja Material Alam Pembangunan Talud JUT	Rp 36.905.000
	Pekerja	Rp 38.335.000
19	BOP Pembangunan Talud	Rp 4.150.000
	DE & RAB	Rp 2.400.000
	Honor TPK	Rp 900.000
	ATK	Rp 850.000

Terkait tabel 1. diatas mengenai daftar usulan RKPDesa di bidang pembangunan Desa terdapat 19 jenis kegiatan namun karena ini hanya sebatas usulan perencanaan maka tentunya tidak semua dapat dilaksanakan, hanya yang terpenting dan mendesak yang akan diprioritaskan. Dari hasil Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrembang) usulan kegiatan yang terlaksana pada tahun anggaran 2020 hanya 13 kegiatan dikarenakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang diterima tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan. Hal ini seperti yang

dikemukakan oleh Sekretaris Desa Banjaranyar, Bapak Dewagun Hasyim yang mengatakan bahwa “Semua usulan yang terdapat di RPKDesa tidak semuanya dimasukkan di APBDDesa dikarenakan dana yang kami terima terbatas jumlahnya. Maka dari itu kami pihak desa hanya memilih pembangunan yang terpenting dan mendesak” (wawancara 24 April 2018).

2. Tahap Impelementasi

Setelah usulan RKPDesa telah selesai dibuat maka kepala desa menyampaikan daftar usulan tersebut kepada bupati melalui camat. Daftar usulan RKPDesa menjadi materi pembahasan didalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) kecamatan dan kabupaten/kota. Selanjutnya bupati menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDesa setelah dilakukannya Musrembang di kantor Kecamatan. Selanjutnya hasil dari Musrembang di jadikan pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan dan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berisi tentang belanja yang di tetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahun. Adapun hasil perhitungan efektivitas Dana Desa di bidang pembangunan Desa Banjaranyar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020

No	Pembangunan Fisik Desa	Target Belanja Dana Desa (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Efektifitas*)	Ket
1	Pengadaan Perbaikan Rumah Sehat Fakir Miskin	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100 %	RAB, SPTB, APBDesa dan LPJ Dana Desa
2	Pembuatan Jembatan Jene" Dinging	Rp 189.735.000	Rp 189.735.000	100 %	RAB, SPTB,
3	Pembuatan Draenase Dusun Balangasana	Rp 80.149.000	Rp 80.149.000	100 %	APBDesa dan LPJ Dana Desa
4	Pembuatan Talud Dusun Maccini Baji (127 M)	Rp 30.572.000	Rp 30.572.000	100 %	RAB, SPTB,
5	Pembuatan Talud Dusun Maciini Baji (334 M)	Rp 66.962.000	Rp 66.962.000	100 %	APBDesa dan LPJ Dana Desa
6	Pembuatan Posyandu Dusun Balangasana	Rp 44.541.500	Rp 44.541.500	100 %	RAB, SPTB,
7	Peningkatan Sanitasi / Jamban Keluarga Miskin	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	100 %	APBDesa dan LPJ Dana Desa
8	Pembuatan Talud Dusun Banjaranyar	Rp 97.860.000	Rp 97.860.000	100 %	RAB, SPTB,
9	Pembuatan Talud	Rp 97.860.000	Rp 97.860.000	100 %	APBDesa dan LPJ Dana Desa
10	Pembuatan Talud Dusun Banjaranyar	Rp 22.284.000	Rp 22.284.000	100 %	RAB, SPTB,

*) Perbandingan Realisasi Belanja Dana Desa terhadap Target belanja Dana Desa dikalikan 100%. Berdasarkan Tabel 5.19 diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Desa Banjaranyar mencapai angka 100% untuk semua jenis kegiatan pembangunan fisik desa. Sesuai indikator pengukuran efektivitas, hasil ini menunjukkan bahwa Dana

Desa yang di alokasikan untuk semua kegiatan pembangunan fisik di Desa Banjaranyar sudah dikelola secara efektif karena semua hasil perhitungan mencapai angka 100%.

Pembahasan

Dana Desa yang dikelola oleh Desa Banjaranyar adalah Dana yang bersumber dari APBN yang penyalurannya dilakukan dengan cara pemerintah pusat mentransferkan Dana tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa di setiap desa di Kabupaten Brebes. Penggunaan Dana Desa di Desa Banjaranyar sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan lebih banyak mengarah kepada bidang pembangunan desa. Hal ini diakui pemerintah Desa Banjaranyar karena sejalan dengan visi pemerintahan untuk Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI. Pengalokasian Dana Desa ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di setiap Dusun di Desa Banjaranyar. Namun terdapat ketidaksesuaian penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk BUMDes karena tidak mencapai 10% dari jumlah Anggaran Dana Desa yang diterima, ini disebabkan karena pemerintah Desa Banjaranyar mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp 50.000.000 dari Dana Bantuan Daerah/Kabupaten untuk BUMDes. Sehingga penggunaan dana desa untuk pembiayaan BUMDes menjadi kurang efektif karena belum memenuhi target penggunaan Dana Desa untuk pembiayaan BUMDes. Berhasilnya Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa di Desa Banjaranyar tahun anggaran 2020 dapat dilihat dari keseluruhan tahap pengelolaan mulai dari tahap perencanaan pembangunan, tahap pelaksanaan pembangunan, tahap pengawasan pembangunan dan tahap pelaporan hasil pembangunan.

Dari analisis hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Banjaranyar sudah mengelola Dana Desa untuk pembangunan fisik desa secara efektif dengan mencapai angka 100% dalam perhitungan rasio efektivitas dan melaksanakan tahapan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum di Indonesia.

Jika dilihat dari awal pengelolaan Dana Desa sudah menunjukkan hasil yang sangat bagus mulai dari terstrukturnya tahap perencanaan pembangunan desa yang dimulai dari diadakannya Musyawarah Dusun (Musdus) sampai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang) di Kecamatan. Terealisasinya anggaran Dana Desa untuk semua kegiatan pembangunan desa yang mencapai angka 100% di tahap pelaksanaan, besarnya peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan turut andilnya seluruh masyarakat desa dalam memantau dan mengawasi jalannya pembangunan, serta transparansi pemerintah desa yang sangat terasa dengan menyediakan seluruh laporan pertanggungjawaban atas Dana Desa yang dikelolanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Wawan Saputra (2016) dengan judul penelitian Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014 yang menunjukan hasil bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam klasifikasi pengukuran efektivitas sudah berada dalam kategori Efektif. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Amelyana Agustin dkk dengan judul penelitian Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang juga menunjukan hasil penelitian yang efektif pada tahun 2010 sampai 2012 karena sudah memenuhi target dan realisasi yang telah ditentukan.

Berdasarkan Kedua hasil penelitian terdahulu diatas yang masing- masing menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan secara efektif maka peneliti berpendapat dengan berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Banjaranyar bahwa pada umumnya Dana Desa telah dikelola dengan baik dan pelaksanaannya telah berpedoman pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Dana Desa yang dikelola di Desa Banjaranyar berasal dari APBN, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes. Pada tahun Anggaran 2020, Desa Banjaranyar menerima dana sebesar Rp 825.448.000. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta penyertaan modal desa (BUMDes).
2. Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Banjaranyar melalui tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, dan pelaporan hasil pembangunan.
3. Efektivitas serapan anggaran Dana Desa dalam kegiatan Pembangunan Fisik Desa di Desa Banjaranyar menunjukkan pencapaian yang tinggi. Rasio efektivitas mencapai 100% ketika membandingkan realisasi anggaran dengan target belanja. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Dana Desa yang dianggarkan oleh pemerintah telah digunakan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan pembangunan fisik desa. Sesuai dengan klasifikasi pengukuran efektivitas pengelolaan Dana Desa, pencapaian angka 100% menandakan bahwa Dana Desa di Desa Banjaranyar telah dikelola secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Eti, K., & Rahmawati, S. D. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 8(3), 120-124.
- Halim, A., dan Kusufi, M.S. 2020. Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik. Edisi 2 (Cetakan Ketiga). Salemba Empat: Jakarta
- Hamzah, Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Penerbit Pustaka: Jawa Timur.
- Handayani, E.K. Partisipasi Petani dalam Pengembangan Program Hutan Rakyat di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Government: jurnal ilmu Pemerintahan, 10-19.
- Kehik, B. S., & Mael, M. Y. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. Agrimor, 2(04), 59-62.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.

-
- Masitoh, S., & Yusuf, Y. (2021). Analisis pengelolaan anggaran dana desa (Studi di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Bogor). In PROSEDING SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (Vol. 4, No. 1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Ridha, F. (2019). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota langsa. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), 252-276.
- Setyosari, Punaji. 2010. Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangannya. Kencana: Jakarta
- Shuha, K. (2018). Analisis pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman). Jurnal Akuntansi, 6(2).
- Sujarweni, V.W. 2015. Akuntansi Desa Panduaan Tata Kelola Keuangan Desa, Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Tikollah, M. R., & A Ngampo, M. Y. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan (JEKPEND), 1(1), 87-96.
- Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Indonesia Accounting Journal, 2(2), 74-86.
- Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Indonesia Accounting Journal, 2(2), 74-86.
- Yusup, M., Abdullah, J., & Hasan, W. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi, 10(2), 189-208.
-